

BAB I

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan-perubahan besar dan terjadi dengan sangat cepat dalam sistem internasional. Salah satu tantangan baru yang mengundang banyak perhatian adalah mengenai konsep keamanan. Perubahan konstelasi politik yang terjadi di Asia Pasifik dewasa ini telah mendorong negara-negara di kawasan ini, tidak terkecuali para anggota ASEAN, untuk semakin memperhatikan masalah keamanan. Khususnya, meningkatnya persengketaan mengenai kepulauan Spratly dan Paracel yang melibatkan Cina dan negara-negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam). Persengketaan yang ditimbulkan dari konflik Laut Cina Selatan ini menimbulkan konflik bilateral (*bilateral dispute*) dan sengketa antar negara (*multilateral dispute*) menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya konflik militer.

A. Alasan Penulisan Judul

Kawasan Asia Pasifik selalu menarik untuk dikaji. Pasca Perang Dunia, kawasan Asia Pasifik lebih dipandang sebagai kawasan yang ditinjau dari aspek ekonomi yang sedang berkembang daripada aspek keamanan regionalnya. Kawasan ini menyimpan potensi konflik yang dapat mempengaruhi keamanan dunia. Salah satu dari kawasan di Asia Pasifik yang rawan akan konflik adalah kawasan Laut Cina Selatan.

Perairan di Laut Cina Selatan merupakan konflik yang kompleks dan melibatkan banyak negara. Isu – isu yang menjadi persinggungan adalah pelayaran dan navigasi, batas teritorial negara, serta kepemilikan Kepulauan Spratly dan Paracel. Negara – negara yang terlibat meliputi Republik Rakyat Cina (RRC), Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand dan Taiwan. Persinggungan – persinggungan kepentingan antar negara – negara ini sering kali menimbulkan ketegangan politik antar negara. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi perdamaian dunia mengingat kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis dan jalur pelayaran dunia.

Untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik, negara – negara di ASEAN dan juga Cina berusaha untuk melakukan resolusi konflik secara damai. Konflik di Laut Cina Selatan telah dimulai sejak tahun 1974, hingga saat ini proses perdamaian yang diupayakan sering mengalami pasang surut. Tahun 2002 dibentuk suatu perjanjian, *The Declaration on the Conduct of Parties in South Cina Sea*, yang berisi peraturan normatif bagi negara – negara yang terlibat konflik di kawasan ini. Dalam proses perdamaian ini kekuatan negosiasi negara – negara ASEAN dan Cina dipertunjukkan. Sebagian negara ASEAN menginginkan perundingan multilateral dan formal. Akan tetapi Cina menginginkan penyelesaian masalah dengan cara non formal dan bilateral. Sepanjang proses perdamaian ini Cina dapat mengarahkan proses perdamaian kawasan dengan cara non formal dan pembahasan bilateral. Penulis merasa tertarik dengan proses perdamaian di

kawasan Laut Cina Selatan, dimana negara – negara yang terlibat konflik saling memperjuangkan kepentingannya di kawasan ini dan bagaimana Cina bisa mengarahkan proses negosiasi seperti yang diinginkan negara ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

**“Dominasi Cina dalam Proses Perdamaian di Laut Cina Selatan Tahun
2002 hingga 2010”**

B. Tujuan Penulisan

1. Berusaha mengkaji, membahas sekaligus memberikan gambaran (deskripsi) secara objektif dan empiris mengenai pengaruh Cina terhadap negara –negara di Asia Tenggara dan juga kekuatan negosiasi negara – negara tersebut.
2. Mempelajari bagaimana suatu negara khususnya Cina dapat mengarahkan proses perdamaian di Laut Cina Selatan sesuai dengan kehendak negara ini.

C. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin telah membentuk konstelasi tatanan dunia yang cenderung ke arah regionalisme. Ancaman keamanan yang dirasakan pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin sudah berganti. Kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan yang lebih memperhatikan isu – isu pembangunan, pertumbuhan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan dan perkembangan sumber daya manusia, teknologi dan informasi, serta

lingkungan. Meskipun demikian, bukan berarti kawasan ini tidak memiliki masalah keamanan. Konflik-konflik yang timbul pun semakin bersifat kawasan dan mencakup isu wilayah dan kedaulatan. Kawasan Asia Tenggara pun tidak luput dari api konflik. Kawasan – kawasan Asia Pasifik yang rawan akan terjadinya konflik adalah Selat Taiwan, Semenanjung Korea, dan Laut Cina Selatan. Dari ketiga konflik ini, konflik di Laut Cina Selatan adalah yang paling sedikit berpotensi menjadi sesuatu yang destruktif baik dari segi mobilisasi kekuatan militer ataupun potensi akan jatuhnya korban, namun konflik ini tetap harus diwaspadai.

Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang membentang dari Selat Malaka di barat daya sampai Selat Taiwan di timur laut. Kawasan ini terdiri dari 200 kepulauan termasuk Kepulauan Spratlys dan Paracel. Secara geografis, Laut Cina Selatan adalah kawasan yang strategis karena perairan ini merupakan jalur transportasi laut dan militer yang padat. Laut Cina Selatan juga merupakan ladang minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Letaknya yang strategis dengan cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah, kawasan ini menyimpan potensi konflik bagi negara-negara di sekitarnya. Klaim-klaim kepemilikan atas wilayah di perairan Laut Cina Selatan mewarnai dinamika konflik tersebut. Negara – negara yang terlibat konflik adalah Cina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Taiwan.

Cina dan Indonesia bersengketa dalam kasus kepemilikan wilayah Laut Natuna, sedangkan Cina, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam

berebut klaim atas sebagian atau keseluruhan dari gugus Kepulauan Spratlys dan Kepulauan Paracel. Cina dan Taiwan dalam satu klaim menyatakan kepemilikan atas 80% dari keseluruhan Laut Cina Selatan yang dibatasi dengan garis berbentuk 'U' yang dibuat dan dipublikasikan Cina pada tahun 1947 sebagai peta resmi negara. Akan tetapi tahun 1995, Cina menyatakan akan menyelesaikan masalah ini berdasarkan *United Nation on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau yang dikenal dengan Hukum Laut Internasional.¹ Berdasarkan Hukum Laut Internasional, batas perairan negara yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah 200 mil dari batas pantai. Permasalahan yang timbul adalah batas ZEE negara-negara tersebut menjadi tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi objek sengketa yang paling banyak diperebutkan oleh negara – negara di kawasan ini. Cina mengklaim keseluruhan dari gugus Kepulauan Spratly yang diberi nama Nansha dan sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, dan di awal abad ke-20, Cina memperluas klaimnya sampai Kepulauan Paracel. Dasar klaim yang dilakukan oleh Cina adalah catatan ekspedisi yang dilakukan oleh pelaut dari Dinasti Han pada tahun 110 Masehi dan Dinasti Ming pada tahun 1403-1433. Cina kemudian mengokupasi beberapa pulau pada tahun 1976, hingga saat ini ada 7 pulau yang berada dibawah kontrol pemerintah Republik Rakyat Cina. Malaysia mengklaim dan mengontrol 2 pulau di Kepulauan Spratly

¹ Mohamed Jawhar bin Hassan, "Disputes in the South China Sea: Approaches for Conflict Management" dalam *Southeast Asian Perspective on Security*, ed. Derek da Cunha (Singapore: Southeast Asian Studies, 2000), hal. 99.

berdasarkan batas landas benua. Malaysia telah membangun infrastruktur dan hotel di salah satu pulau yang diklaimnya. Filipina secara resmi mengklaim 8 pulau di Kepulauan Spratly berdasarkan penjelajahan pada tahun 1956. Pada tahun 1972 Pemerintah Filipina memasukkan 8 pulau tersebut di bawah pemerintahan Provinsi Palawan. Dasar klaim Taiwan hampir sama dengan klaim Cina atas kepulauan Spratly. Taiwan mengontrol 1 pulau yakni Pulau Itu Aba. Vietnam mengklaim keseluruhan dari Kepulauan Spratly dan Parcel berdasarkan catatan sejarah dan batas landas benua. Kini Vietnam telah menguasai 21 pulau di gugus Kepulauan Spratly di bawah pemerintahan Provinsi Khanh Hoa.²

Sengketa territorial atas Kepulauan Spratly dan Parcel selalu menyangkut kepentingan nasional negara-negara yang mengklaimnya. Kedaulatan nasional dan integritas wilayah adalah hal yang biasa untuk dipermasalahkan. Semua negara pengklaim menganggap kepentingan ini sebagai yang utama. Ini lah alasan dimana negara begitu mempersiapkan segala hal dengan begitu luar biasa untuk membela citra, kehormatan, dan kebanggaan nasional. Perairan ini juga mengandung nilai strategis yang menjadi salah satu kepentingan negara pengklaim. Jalur pelayaran di perairan ini merupakan 25% dari rute pelayaran dunia dan melintasi Kepulauan Spratly. Kontrol atas kepulauan ini berarti dominasi atas rute pelayaran di Asia Pasifik. Walaupun hingga saat ini belum ada penemuan akan minyak bumi dan gas alam, prospek yang dibawa oleh kedua hal ini

² *South Cina Sea* (diakses pada 26 Juni 2010); diunduh dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/south-Cina-sea.htm>

menjadi kepentingan yang patut diperjuangkan oleh negara – negara pengklaim. Cina dan begitu juga negara – negara yang terlibat sengketa, percaya akan cadangan gas alam dan minyak bumi yang melimpah di perut bumi di dasar Laut Cina Selatan. Menipisnya suplai energi untuk pembangunan ekonomi, membuat banyak negara mengincar hak eksplorasi mineral di perairan ini.

Kepulauan Spratly dan Laut Cina Selatan sering dipandang sebagai sengketa militer di masa depan di kawasan Asia Tenggara. Semua negara pengklaim, kecuali Brunei Darussalam, memiliki pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan telah diperkuat setiap waktu. Cina, Taiwan, Malaysia dan Filipina telah mengembangkan kekuatan angkatan lautnya untuk menegaskan klaimnya di Kepulauan Spratly. Salah satu kontak senjata yang tercatat adalah pada tahun 2002, tentara Vietnam menembaki tentara Filipina yang berpatroli di kawasan Kepulauan Spratly.³ Tahun 2009 Pemerintah Cina menahan 25 nelayan asal Vietnam dengan tuduhan melanggar batas teritorial karena berlayar di sekitar Kepulauan Parcel. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari rakyat Vietnam yang mengadakan demonstrasi dan kecaman terhadap pemerintah Cina.⁴

Isu sengketa klaim atas Kepulauan Spratly dan Parcel menjadi perhatian bagi ASEAN karena sengketa ini menyangkut keamanan regional, hubungan antar negara anggota ASEAN dimana 3 negara di ASEAN

³U.S. Energy Information Administration, *South Cina Sea Region* (diakses pada 26 Juni 2010); diunduh pada <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/schina.html>

⁴*Ibid*

mengajukan klaim atas kepulauan tersebut, serta keterlibatan kekuatan besar di luar keanggotaan ASEAN, yakni Cina dalam konflik tersebut. Oleh karena itu ASEAN melalui ASEAN Regional Forum (ARF) membentuk suatu manajemen penyelesaian konflik secara damai bagi negara anggota ASEAN dan Cina. Salah satu produk ARF untuk mendamaikan konflik di wilayah tersebut, dikeluarkanlah *The Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea* yang diratifikasi pada 4 November 2002. Dalam deklarasi antara ASEAN dan Cina ini disepakati bahwa sengketa territorial di Laut Cina Selatan tidak akan menjadi isu internasional atau isu multilateral.

Delapan tahun setelah deklarasi ASEAN dengan Cina mengenai konflik Laut Cina Selatan diratifikasi, kejelasan status atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Parcel belum menemukan titik terang. Cina yang agresif mengenai klaimnya atas Kepulauan Spratly dan Parcel, mencoba untuk memperluas pengaruhnya untuk menghindari sorotan internasional atas konflik teritori tersebut. ASEAN menuntut agar dilakukannya negosiasi secara multilateral, untuk mengurangi dominasi Cina. Cina, di pihak lain, bersikeras untuk menerapkan solusi damai melalui pembicaraan bilateral antara pemerintah Cina dengan pemerintah negara yang terlibat konflik dengan Cina secara informal. Pemerintah Cina ingin mengarahkan penyelesaian konflik agar tidak meluas menjadi pembahasan global. Tahun 1999 Filipina berusaha untuk mengundang pihak ketiga yakni Amerika Serikat dan Jepang untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Tetapi hal tersebut langsung ditolak oleh Cina, bahkan ASEAN pun terpecah antara

yang menginginkan pihak ketiga dengan yang tidak menginginkan. Akhirnya negosiasi pun gagal dilaksanakan.⁵ Bahkan PBB pun tidak bisa ikut campur dalam konflik di kawasan ini. Hal ini disebabkan Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) memiliki hak *veto* untuk menolak resolusi DK PBB yang menyangkut sengketa Laut Cina Selatan.

Pada pertemuan ARF yang diselenggarakan di Hanoi pada 23 Juli 2010, pemerintah Cina mengecam upaya internasionalisasi isu keamanan di laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Cina, Yang Jienchi, menyatakan bahwa *The Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea* telah memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan stabilitas kawasan. Yang Jienchi mengakui adanya pertikaian teritori dan perairan, akan tetapi persoalan tersebut tidak boleh dilihat sebagai pertikaian antara Cina dengan ASEAN, tetapi sebagai konflik bilateral antara China dengan negara – negara yang bertikai.⁶ Bergulirnya pertemuan ARF tersebut masih belum dapat menyelesaikan dan memutuskan bagaimana kepemilikan atas sengketa wilayah yang terdapat di Laut Cina Selatan.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka timbul lah pertanyaan yang akan menjadi pokok kajian pada penulisan ini yaitu, **Bagaimana upaya Cina**

⁵ “South China Morning Post” edisi 14 Maret 1999 dalam Niklas Swanstrom, *Conflict Management and Negotiation in the South China Sea: ASEAN WAY* (Swedia: Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University), hal. 99.

⁶ *China Terjerat”Internasionalisasi” Isu Laut Selatan*, Suara Media edisi 1 Agustus 2010 (diakses pada 3 Oktober 2010); diunduh dari <http://www.suaramedia.com/berita-dunia/asia/26410-china-terjerat-qinternasionalisasiq-isu-laut-selatan.html>

dalam mendominasi proses perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan yang dilakukan bersama dengan ASEAN?

E. Kerangka Dasar Teori

Penulis menganalisa persoalan di Laut Cina Selatan dengan menggunakan kerangka besar Negosiasi yang mencakup konsep *Great Power* dan *Organizational Management*. Konsep negosiasi dipakai dalam skripsi ini untuk menjelaskan proses bagaimana kebijakan ASEAN dan Cina dibuat menyangkut isu keamanan di Laut Cina Selatan. Menurut J. Rubin, negosiasi adalah sebuah metode untuk mendamaikan pertentangan daripada menyelesaikannya. Fokus negosiasi bukan pada sikap itu sendiri, tetapi pada perjanjian untuk mengubah perilaku sehingga mendamaikan permasalahan menjadi mungkin.⁷ Daniel Druckman telah mengembangkan empat strategi berbeda dalam negosiasi: a. *Puzzle Solving*, b. *Bargaining Game*, c. *Organizational Management* dan, d. *Diplomatic Politics*.⁸ Dalam kasus proses perdamaian di Laut Cina Selatan, konsep strategi negosiasi yang cocok adalah *Organizational Management* dan *Diplomatic Politics*.

1. Konsep Kekuasaan Besar (Great Power) dalam Negosiasi *Diplomatic Politics*

Negosiasi sebagai ‘Politik Diplomatis’ memandang negosiasi sebagai wadah lain untuk memainkan politik internasional. Negosiasi adalah bagian

⁷ J.W. Breslin, “Negotiation Theory and Prctice” dalam *Conflict Management and Negotiation in the South Cina Sea: ASEAN WAY* oleh Niklas Swanstrom, hal. 95.

⁸ Daniel Druckman, “Negotiating in International Conflict”, dalam *Conflict Management and Negotiation in the South Cina Sea: ASEAN WAY* oleh Niklas Swanstrom, hal. 95.

kecil dari hubungan internasional, dimana interaksi parallel atau hubungan yang bersilangan diantara banyak tipe kegiatan diplomatik yang saling mempengaruhi. Aktor-aktor negosiasi ini adalah pemerintah yang mana tindakannya ditentukan oleh kebijakan prerogatif dan elemen struktural dalam sistem internasional.

Negosiasi digunakan sebagai sarana dalam proses politik internasional apabila suatu negara berusaha untuk mengubah atau mendukung perilaku (misalnya tindakan, citra, dan kebijakan) negara lain. Secara umum hal ini merupakan kekuasaan (*power*) yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mengendalikan perilaku negara lain. *Power* adalah modal dan tujuan akhir yang dijalankan dalam suatu proses negosiasi.

Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa pokok bahasan utama dalam studi Hubungan Internasional adalah politik internasional atau usaha memperjuangkan kekuasaan antar negara-bangsa dimana politik internasional sebagaimana semua politik lain, merupakan usaha memperjuangkan kekuasaan.⁹ Negara – negara berlomba untuk memperluas kekuasaannya di dunia internasional demi meraih kepentingan nasionalnya.

Kekuasaan atau *power* telah menjadi unsur utama dalam perilaku politik. Seiring perkembangan zaman telah terjadi perdebatan mengenai definisi kekuasaan itu sendiri. Kautilya, seorang ahli tata negara India kuno mengartikan kekuasaan sebagai “*pemilikan kekuasaan [suatu atribut] yang*

⁹ Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (LP3ES: 1992), hal. 117.

terdiri dari tiga unsur, yaitu pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.”¹⁰ Sedangkan pada zaman modern, Morgenthau mendefinisikan power sebagai hubungan antar dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B. Dengan demikian, kekuasaan menurut Morgenthau adalah “bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain [dan itu] meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan [pengendalian] itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain”

Pandangan *Power* menurut Coulumbis dan Wolfe adalah memiliki tiga unsur, yakni:

1. Daya paksa (*force*) yang didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan ekonomi maupun militer sebagai instrument pemaksa oleh aktor dominan untuk mewujudkan tujuannya.
2. Pengaruh (*influence*) didefinisikan sebagai penggunaan alat persuasif (tanpa kekerasan) untuk mengendalikan suatu aktor agar tetap sesuai dengan yang diinginkan oleh aktor pengendali.

¹⁰ *Ibid*

3. Wewenang (authority) sikap tunduk kepada aktor dominan yang diberikan oleh aktor lain. Sikap ini muncul dari wujud penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian.¹¹

Suatu negara memerlukan sumber kekuasaan untuk memperbesar dan mempertahankan kekuasaannya serta untuk memengaruhi negara lain. Sumber daya ini sering disebut sebagai kekuatan nasional. Kekuatan nasional dapat bersifat kekuatan yang nyata/terlihat (*tangible power*) seperti kekuatan ekonomi dan militer, serta kekuatan yang bersifat tidak terlihat (*intangible power*) berupa kekuatan politik dan diplomasi negara. Dalam hubungan politik internasional, tidak setiap negara memiliki pengaruh ataupun sumber kekuasaan yang sama. Selama ini, para ilmuwan Hubungan Internasional telah melakukan penelitian untuk membandingkan kekuasaan negara berdasarkan kekuatan nasionalnya. Klasifikasi negara berdasarkan kekuatan nasional yang umum dikenal antara lain, negara adi daya atau *super power country*, *great power country*, dan *middle power country*, serta *core state* dan *pheri – pheri state*.

Negara *Great Power* adalah suatu negara yang memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruhnya dalam skala global. Negara – negara *great power* bercirikan memiliki kekuatan ekonomi, militer, diplomasi dan kebudayaan yang kuat daripada negara lain, sehingga negara-negara yang berkekuatan lebih kecil akan mempertimbangkan segala kebijakannya yang berkaitan dengan negara-negara *great power*. Dalam lingkungan domestik,

¹¹ *Ibid*, hal. 118.

kekuatan tersebut diukur dari kapasitas sumber daya alam, kemajuan industry, kekuatan militer, jumlah populasi, dan dukungan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Kemampuan ekonomi menentukan potensi militer dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, indikator utama negara *great power* adalah total *Gross Domestic Product* (GDP), yang dapat mengukur total nilai barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. GDP menyediakan indikator yang jelas bagi ukuran ekonomi, kapasitas teknologi dan kemakmuran.¹² Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) juga merupakan salah satu kriteria negara disebut dengan negara *great power*. Kelima negara tersebut, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis dan Inggris, juga dikategorikan sebagai negara yang memiliki senjata nuklir dibawah *Nuclear Non – Proliferation Treaty*. Jepang dan Jerman juga termasuk dalam jajaran negara *great power* dengan majunya kekuatan ekonomi kedua negara tersebut.

Pada masa Perang Dunia dan perang Dingin, negara disebut sebagai negara yang mempunyai kekuatan besar adalah negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang kuat. Akan tetapi terjadi pergeseran pandangan akan polaritas keuaatan besar internasional pasca Perang Dingin. Besar kecilnya kekuatan negara dalam mempengaruhi lingkungan global bukan hanya ditentukan dari kekuatan militer, ekonomi, tetapi juga kekuatan diplomasi dalam meraih kepentingan nasional. Sumber daya ini sangat penting dalam mempertahankan pengaruh suatu negara terhadap negara lain.

¹² MSN Encarta Encyclopedia, *Great Power*, (diakses pada 15 November 2010); diunduh dari <http://www.webcitation.org/5kwqEr8pe>

Cina melakukan negosiasi dengan cara yang agresif dan mengandung unsur pemaksaan kehendak dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Sebelum tahun 2000an, Cina dalam negosiasinya selalu menunjukkan ketidakinginannya untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan melalui jalur formal dan multilateral. Setiap kali negara anggota ASEAN mengajukan usulan pembahasan konflik Laut Cina Selatan di forum multilateral seperti ARF, Cina selalu melancarkan penolakannya. Cina telah mengembangkan taktik negosiasi yang disebut “Tiga Tidak”, tidak untuk internasionalisasi pembahasan konflik, tidak untuk negosiasi multilateral, dan tidak untuk spesifikasi wilayah yang diinginkan Cina. Taktik negosiasi ini membawa keuntungan bagi Cina dan sangat sulit untuk mengubah pendirian negara ini.¹³ Cina yang dapat dikategorikan sebagai negara *great power* menggunakan kekuatan nasionalnya demi mencapai tujuan nasional di laut Cina Selatan dalam proses negosiasi. Untuk mempengaruhi tindakan negara – negara lain, dalam hal ini negara – negara anggota ASEAN, Cina memanfaatkan kapasitas militer, ekonomi dan diplomasi dalam teknik negosiasinya.

1. Kapasitas Militer

Pandangan kaum Realis yang meyakini bahwa hubungan antar negara di dunia bersifat anarkis. Untuk menjadi negara yang kuat diperlukan kemampuan untuk berperang, sehingga peningkatan kapasitas militer suatu negara adalah mutlak hukumnya. Penggunaan kapasitas militer dalam

¹³ Breslin, *op. cit.*

penyelesaian masalah internasional sering kali dikonotasikan sebagai tindakan kekerasan. Dalam perkembangannya, kekuatan militer tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan *survival* suatu negara dalam konstelasi internasional, namun lebih dari itu dapat digunakan sebagai penopang dalam proses diplomasi.

Cina memiliki kekuatan militer yang lebih besar dibandingkan negara – negara ASEAN satu per satu maupun digabungkan. Di tahun 2008 Cina mengumumkan peningkatan dana pembelanjaan militer sebesar 17,6 persen. Itu artinya anggaran belanja militer Cina pada tahun 2008 ini mencapai sekitar 418 juta yuan. Elit militer Cina menyatakan bahwa peningkatan anggaran militer tersebut ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki kelemahan pertahanan Cina. Negara ini menghabiskan 4,3 % dari GDP untuk belanja militer.¹⁴ Seperti yang ditulis You Xu dan You Ji dalam artikelnya “*In Search of Blue Water Power: The PLA Navy’s Maritime Strategy in the 1990s and Beyond*”, selaras dengan strategi besar Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) dalam dua dekade pertama abad ke- 21. Pada kurun waktu tersebut Angkatan Laut Cina diharapkan sudah mampu menjelajah seluruh lautan dunia. Pada tahap pertama, satuan-satuan pasukan gerak cepat yang dikembangkan akan didampingi oleh *aircraft carriers* dan membentuk sistem penyerangan dan pertahanan tiga dimensi yang terdiri dari perlengkapan serang udara, permukaan, dan kapal selam. Pada tahap kedua, pengembangan peralatan perang berteknologi tinggi akan diterapkan pada

¹⁴ *China*, (diakses pada 19 Oktober 2009) diunduh dari http://www.cia.gov/library/the_world_factbook/china

seluruh angkatan bersenjata Cina. Diharapkan setelah tahun 2020 Cina akan menjadi kekuatan laut yang handal dan berskala global.¹⁵ Menjadi salah satu anggota tetap DK PBB dan merupakan negara yang memiliki senjata nuklir menjadikan Cina sebagai *great power* dikawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dari segi kapasitas militer dan penjagaan keamanan global.

2. Kapasitas Ekonomi

Pada akhir tahun 1970an, Deng Xiaoping berinisiasi untuk mereformasi sistem ekonomi menjadi lebih terbuka dan menjadi langkah awal bagi Cina untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Keberhasilan Deng Xiaoping dalam memajukan Cina menjadi salah satu aktor yang berpengaruh di dunia internasional. Berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan modernisasi Cina bergantung pada perdagangan internasional dan penanaman modal asing (PMA).

Dari tahun 1990 hingga 1999, total perdagangan asing Cina mengalami peningkatan dari 116.6 milyar dollar AS per tahun menjadi 360.6 milyar dollar AS per tahun. Di tahun 1999, Cina menjadi negara tujuan utama PMA di Asia dengan total 38 milyar dollar AS.¹⁶ Akhir 2009, Cina akan menggeser Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor dua dunia. Hal ini terjadi hanya dua tahun setelah Cina melampaui Jerman sebagai

¹⁵ Yanyan Mochamad Yani, *Kemampuan Militer China Cemaskan AS*, (diakses pada 2 November 2010); diunduh dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/kemampuan_militer_cina-cemaskan_as.pdf

¹⁶ Paul H.B. Godwin, *China as Regional Hegemon?*(diakses pada 3 Oktober 2010); diunduh dari <http://www.southchinasea.org/docs/Godwin,%20China%20as%20a%20Regional%20Hegemon.pdf>

kekuatan ekonomi nomor tiga dunia. Lima tahun yang lalu, GDP China hanya 2,3 triliun dollar AS, sekitar separuh dari GDP Jepang. Kini, dalam jangka waktu yang sangat singkat, ternyata Jepang dapat dilewati oleh China. Pada tanggal 16 Agustus 2010, pemerintah Jepang resmi menyatakan bahwa perekonomian mereka bernilai 1,28 triliun dollar AS pada kuartal kedua 2010, di bawah China yang bernilai 1,33 triliun dollar AS.¹⁷

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina, negara ini mulai memainkan perannya di kancah perekonomian dunia dengan membuka hubungan perdagangan bebas (*free trade*) dengan negara – negara lain. Salah satu kawasan yang menjadi target dari pasar bebas dengan Cina adalah negara – negara di kawasan Asia Tenggara. Tahun 2000, pemimpin politik dari sepuluh negara ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) dan Cina sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi melalui perdagangan bebas yang diberi nama *ASEAN – Cina Free Trade Area* (ACFTA). Meskipun ACFTA merupakan kerjasama dibidang ekonomi, tetapi tidak sedikit ahli yang berpendapat bahwa kerjasama ini juga mencakup keamanan regional. Dengan kata lain kerjasama ekonomi Cina – ASEAN diharapkan memfasilitasi stabilitas dan kemandirian regional. Negara – negara yang memiliki hubungan dagang dengan satu sama lain, akan memiliki peluang yang kecil untuk saling berperang. Meningkatnya interdependensi antar negara mengurangi efek negatif dari anarkhi yang selama ini mewarnai hubungan antar negara

¹⁷ *Ekonomi China Resmi Salip Jepang*, Harian Kompas edisi 18 Agustus 2010.

3. Kapasitas Diplomasi

Dalam upaya mencapai tujuan, mewujudkan nilai atau mempertahankan kepentingan nasional, pemerintah harus berkomunikasi dengan pihak yang tindakan dan perilakunya ingin dicegah, diubah atau diperkuat. Terdapat banyak peluang dan media komunikasi yang dapat menyampaikan harapan, keinginan dan ancaman kepada pihak lain. Upaya pemerintah dalam menanamkan pengaruh di luar negeri dilaksanakan melalui saluran diplomatik formal atau komunikasi langsung antar menteri dan kepala negara.

Cina bagi negara – negara ASEAN merupakan partner penting dalam urusan ekonomi politik. Hal ini dapat dilihat dari seringnya Cina bergabung dengan forum – forum yang diadakan oleh ASEAN seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Plus Three Meeting* (APT) dan *East Asia Summit* (EAS). Sikap politik Cina yang kuat mulai terlihat ketika negara ini mulai menentang kekuatan hegemoni lama yakni Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina sering memprotes campur tangan pihak ketiga (Amerika Serikat dan Jepang) dalam konflik di Laut Cina Selatan. Melalui payung ekonomi Cina mulai sering menanamkan kebijakannya kepada negara ASEAN. Negara – negara ASEAN seolah – olah tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Cina. Pemerintah Cina menginginkan penyelesaian bilateral dan tetap menjadi masalah antara Cina dengan negara ASEAN, mengenai sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Sebagian besar negara – negara ASEAN setuju dengan kebijakan tersebut. Bagi negara yang

tidak setuju seperti Filipina, upaya tersebut belum membuahkan hasil bahwa Cina belum berhasil diajak berunding dalam format perundingan multilateral dan membawa pihak ketiga.

2. Konsep Negosiasi Sebagai *Organizational Management*

Negosiasi sebagai *Organizational Management* dilihat sebagai proses membangun sebuah konsensus diantara konstituen yang berbeda dengan berpegang pada hasil. Konstituen kunci adalah para pelaku utama atau pemegang kekuasaan dalam organisasi yang direpresentasikan dalam negosiasi. Prosesnya sangat dinamis, terdiri dari dua (atau multi) arah komunikasi diantara para negosiator, konstituen, dan para pelaku utama sebelum dan selama negosiasi. Terdapat dilema negosiator yang dikenal dengan "*boundary role conflict*", yakni terhimpit diantara harapan yang saling bertentangan antara konstituen di negara asal dengan pihak-pihak lain dalam negosiasi.

Sejak awal berdirinya ASEAN, kerjasama politik dan keamanan mendapat perhatian dan dinilai penting. Kerjasama politik dan keamanan terutama diarahkan untuk mengembangkan penyelesaian secara damai sengketa-sengketa regional, menciptakan dan memelihara kawasan yang damai dan stabil, serta mengupayakan koordinasi sikap politik dalam menghadapi berbagai masalah politik regional dan global. Dengan kata lain, Deklarasi Bangkok mengandung keinginan politik para pendiri ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan kerjasama

regional. Pada prinsipnya kerjasama politik dan keamanan ASEAN mempunyai arah dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan dengan bertumpu pada dinamika dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus dapat membangun rasa saling percaya (*confidence building*) menuju suatu “masyarakat kepentingan keamanan bersama” di Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang kemudian sehingga menumbuhkan pengharapan terciptanya sebuah lingkungan strategis yang diharapkan.

Berdasarkan tujuan-tujuan dasar organisasi tersebut, ASEAN berupaya untuk mengambil bagian dalam memecahkan persoalan konflik Laut Cina Selatan dengan upaya-upaya damai. Apalagi, ketegangan yang terjadi diantara negara-negara yang bersengketa sangat rawan konflik. Kondisi ini mencerminkan adanya dilema keamanan (*security dilemma*) sehingga mendorong lahirnya konsep yang lazim disebut sebagai *security interdependence*, yaitu bentuk usaha keamanan bersama untuk mengawasi masalah-masalah regional, yang menyangkut keamanan regional yang diakibatkan munculnya gangguan di kawasan Laut Cina Selatan.

Dalam menyelesaikan konflik, organisasi ASEAN memiliki cara yang khas untuk melaksanakan proses negosiasi, yakni dengan metode penyelesaian informal yang dikenal dengan *ASEAN Ways*. *ASEAN Ways* yang menjadi metode penyelesaian konflik bersumber dari konsep musyawarah dan mufakat. Artinya bahwa negara – negara anggota ASEAN sangat mementingkan adanya kesepakatan atau konsensus dalam setiap

penyelesaian masalah. Cara ini akan sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Cina Selatan apabila prinsip tidak mengintervensi urusan dalam negeri dapat diubah. Selama ini hasil – hasil negosiasi yang dilakukan oleh ASEAN adalah bersifat normatif dan tidak mengikat dimana walaupun ada negara yang melanggar kesepakatan tidak akan dikenakan sanksi.

Prinsip organisasi ASEAN yang bercorak kekeluargaan akhirnya membuahkan hasil dengan mengajak Cina berunding dalam perundingan multilateral tetapi informal. ASEAN menggunakan cara *Confidence Building Measures* (CBM) untuk mencegah eskalasi konflik yang berakhir dengan peperangan. Melalui CBM, perspektif Cina atas ASEAN yang semula dianggap sebagai ancaman mulai berubah. Cina mulai diundang untuk menghadiri ARF dan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM). Hal ini menciptakan atmosfer yang lebih santai dalam hubungan ASEAN dengan Cina. Dengan CBM ini pula *The Declaration on the Conduct of Parties in South Cina Sea* diratifikasi pada 4 November 2002 oleh menteri luar negeri dari sepuluh negara anggota ASEAN dan menteri luar negeri Cina.

F. Hipotesa

Dari permasalahan dan teori yang dipergunakan maka dapat diambil hipotesa sementara mengenai kebijakan pemerintah Cina dalam mempengaruhi proses perdamaian Laut Cina Selatan yang dilakukan bersama dengan ASEAN, adalah sebagai berikut:

1. Cina menggunakan strategi negosiasi *diplomatic politics* berupa kekuatan politik, militer dan ekonomi sebagai negara *great power* di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.
2. Cina menggunakan strategi negosiasi *organizational management* dengan memanfaatkan metode *ASEAN Ways* yang bersifat kekeluargaan untuk bernegosiasi tentang kebijakan keamanan di Laut Cina Selatan.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti perkembangan konflik di Laut Cina Selatan dan kebijakan pemerintah Cina mengenai konflik ini, serta upaya perdamaian dengan negara – negara ASEAN pasca penandatanganan *The Declaration on the Conduct of Parties in South Cina Sea* di tahun 2002. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penulis dalam mengklasifikasikan data-data yang ada, mengingat konflik di Laut Cina Selatan masih bergulir dan cenderung fluktuatif.

H. Metode Penelitian Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, internet, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas.

Dalam Bab I ini memuat Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Teoritis, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, Dan Sistematika Penulisan.

Dalam Bab II penulis akan menguraikan konflik di Laut Cina Selatan yang bermula dari munculnya klaim – klaim dari Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam terhadap kawasan di perairan ini khususnya di Kepulauan Sparty dan Paracel, perundingan – perundingan yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan di kawasan ini.

Bab III akan menguraikan serta karakteristik negosiasi yang dikembangkan oleh ASEAN, sehingga Cina dapat mempengaruhi ASEAN dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan.

Dalam Bab IV akan diuraikan peran Cina sebagai negara *great power* di kawasan Asia Timur dan Tenggara sehingga bisa mempengaruhi proses perdamaian dan negosiasi mengenai konflik Laut Cina Selatan.

Dalam Bab V akan diuraikan mengenai kesimpulan dari tulisan ilmiah ini.